

RENCANA KERJA

SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGARSI

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2014

I. LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang lahir pada era reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang memiliki luas wilayah seluas 81.725 Km², dimana daratan lebih kurang 16.424,14 Km² atau 20,10% dari luas perairan lebih kurang 65.301 Km² atau 79,90 % dari luas wilayah dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 1.223.296 jiwa. Ini menunjukkan peningkatan 36,06 % dari tahun 2000, dengan jumlah penduduk sebesar 899.095 jiwa (hasil Sensus Penduduk 2000).

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar dan ratusan pulau kecil. Dua pulau tersebut adalah Pulau Bangka dan Pulau Belitung, selain itu terdapat pulau-pulau besar lainnya diantaranya Pulau Lepar, Pongok, Pulau Nangka, Pulau Panjang, Pulau Seliu, Pulau Mendanau, Pulau Gelasa, Pulau Selat Nasik, Pulau Nado dan Pulau Batu Dinding.

Secara umum, wilayah ini memiliki iklim tropis dan basah dan merupakan wilayah yang dikelilingi lautan. Kondisi ini menyebabkan banyak terjadi pembentukan awan dan uap air laut. Sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan pembangunan serta perubahan sejak reformasi tahun 1997 dimana sebagian besar masyarakat beralih profesi dari petani menjadi penambang yang penghasilannya lebih menggiurkan dengan waktu yang relatif singkat, dampak yang terjadi perkebunan lada yang selama ini sebagai primadona bagi masyarakat Bangka Belitung mulai ditinggalkan, kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat deposit timah tidak selamanya dapat menjadi andalan untuk menopang perekonomian masyarakat karena suatu saat akan habis dan berakhir.

Bilamana hal ini tidak diantisipasi sejak dini tidak menutup kemungkinan akan menjadi dampak sosial yang sangat serius karena berpotensi meningkatkan angka pengangguran yang cukup signifikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Angka pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Desember 2012 dari angkatan kerja sebesar 604.163 jiwa adalah 21.061 orang, 22,2 % diantaranya bekerja di sektor pertambangan. Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sesuai dengan prioritas dan arah pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melaksanakan berbagai program pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

II. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, sebagai gambaran yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :
"TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA MELALUI PENGEMBANGAN SINERGITAS DAN KONEKTIVITAS DESA DAN KOTA"

Visi merupakan tujuan pembangunan disektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah program Pembangunan Daerah (Propeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Penjabaran dari landasan institusional dan landasan operasional Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*"

Penjelasan Lebih lanjut tentang arah pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- a. **Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**
- b. **Perbaikan iklim ketenagakerjaan**
- c. **Pengurangan kesenjangan pembangunan daerah**

2. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas ditetapkanlah Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

- a. **Meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta memperluas kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja;**
- b. **Meningkatkan pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan pengawasan ketenagakerjaan;**
- c. **Membangun kawasan serta melaksanakan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;**
- d. **Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*)**

III. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 adalah menjabarkan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat kerangka acuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta program kerja dan pendanaannya tahun 2014.

b. TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 ini bertujuan :

1. **Menyediakan bahan program kegiatan dan anggaran bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam jangka 1 (satu) tahun.**

2. **Terciptanya keterkaitan, konstitusi dan integritas antara perencanaan, pengayoman, pelaksanaan dan pengawasan pembayaran secara terpadu.**
3. **Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.**
4. **Menciptakan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja baik diperkotaan maupun di pedesaan**
5. **Mendidik dan melatih para pencari kerja agar dapat mencari nafkahnya sendiri sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan.**
6. **Terlaksanya program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran baik pengangguran terbuka maupun setengah penganggur.**
7. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

c. SASARAN

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 ini memiliki sasaran sebagai berikut :

1. **Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**
2. **Perbaikan melalui ketenagakerjaan dan ketransmigrasian**
3. **Pengurangan ketimpangan pembangunan daerah**

IV. PROFIL DISNAKERTRANS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 21 November 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas terdiri dari:

- 1. Sekretariat;**
 - 2. Bidang Transmigrasi;**
 - 3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;**
 - 4. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial;**
 - 5. Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi;**
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);**
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.**
- a. Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur staf dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretaris adalah memberikan pelayanan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1. Memimpin dan pengkoordinasian sub bagian dan staf yang berada di bawah Sekretariat;**
- 2. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dinas sesuai dengan bidang tugasnya;**
- 3. Pelaksanaan urusan umum;**
- 4. Pelaksanaan urusan keuangan;**
- 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian;**

6. **Pengkoordinasian tugas bidang dan UPTD;**
7. **Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;**
8. **Pembinaan staf;**
9. **Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.**

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris dibantu oleh :

1. **Sub Bagian Keuangan;**
2. **Sub Bagian Umum;**
3. **Sub Bagian Kepegawaian.**

b. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi merupakan unsur staf dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas Pokok Kepala Bidang Transmigrasi melaksanakan pengadaan dan sarana transmigrasi, penyiapan lahan dan pengelolaan pemukiman, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. **Memimpin dan pengkoordinasian kasi-kasi dan staf yang berada di bawah Bidang Transmigrasi;**
2. **Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan analisis dan penyiapan data serta informasi di bidang ketransmigrasian;**
3. **Penyiapan calon areal transmigrasi sesuai dengan ketentuan 4L dan 2 C;**
4. **Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi;**
5. **Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat;**
6. **Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan bidang tugasnya;**

7. **Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan transmigrasi;**
8. **Pelaksanaan pembinaan staf;**
9. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang transmigrasi;**
10. **Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Transmigrasi dibantu oleh :

1. **Seksi Pengadaan Sarana Transmigrasi;**
 2. **Seksi Penyiapan Lahan dan Pengelola Permukiman;**
 3. **Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha.**
- c. **Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja**

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja merupakan unsur staf dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah melaksanakan pelatihan, pemagangan, sertifikasi, penyebaran informasi kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan pendataan tenaga kerja asing.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. **Memimpin dan pengkoordinasian kasi-kasi dan staf yang berada di bawah pengawasan bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;**
2. **Pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan sertifikasi;**
3. **Pelaksanaan penyusunan/penghimpunan informasi kerja dan bursa kerja;**
4. **Pelaksanaan penyebaran informasi kerja dan bursa kerja;**
5. **Pelaksanaan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;**

6. Pelaksanaan pendataan dan perpanjangan perizinan tenaga kerja asing;
7. Penghimpunan dan penyebarluasan peraturan-peraturan ketenagakerjaan;
8. Pelaksanaan kerjasama di bidang ketenagakerjaan;
9. Pelaksanaan pembinaan staf;
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dibantu oleh :

1. Seksi Pelatihan Perusahaan, Pemagangan dan Sertifikasi;
 2. Seksi Informasi Kerja dan Bursa Kerja;
 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Tenaga Asing.
- d. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial

Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial merupakan unsur staf dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, syarat kerja dan penyelesaian perselisihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. Memimpin pengkoordinasian tugas kasi-kasi dan staf yang berada di bawah pengawasan Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial;
2. Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial;

3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang pengawasan dan hubungan industrial dengan pusat dan kab/kota;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja dan jamsostek, K3 dan penyelesaian perselisihan;
5. Pemberian petunjuk teknis ke kabupaten/kota tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, syarat kerja dan penyelesaian perselisihan;
6. Pemberian saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Pelaksanaan pembinaan staf;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke perusahaan-perusahaan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial dibantu oleh :

1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 3. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan.
- e. Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi

Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi merupakan unsur staf dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Kepala Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi melaksanakan penyusunan dan perencanaan program, menghimpun dan menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

1. **Memimpin dan pengkoordinasian kasi-kasi dan staf yang berada di bawah Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi;**
2. **Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan-bahan usulan program baik APBD, APBN dan Pembantuan dari tiap-tiap Bidang dan UPTD;**
3. **Penyiapan dan menyampaikan usulan program baik program APBD, APBN dan Pembantuan;**
4. **Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pembahasan program di daerah, pusat dan regional;**
5. **Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi penyusunan program;**
6. **Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan bidang tugasnya;**
7. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;**
8. **Pelaksanaan penghimpunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;**
9. **Pelaksanaan pembinaan staf;**
10. **Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi dibantu oleh :

1. **Seksi Perencanaan Program;**
 2. **Seksi Pelaporan;**
 3. **Seksi Evaluasi.**
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur operasional dinas yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dibantu oleh :

1. **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**
2. **Instruktur Mekanik**
3. **Instruktur Otomotif**
4. **Instruktur Listrik**
5. **Instruktur Pertanian**
6. **Instruktur Meubelair**
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional**

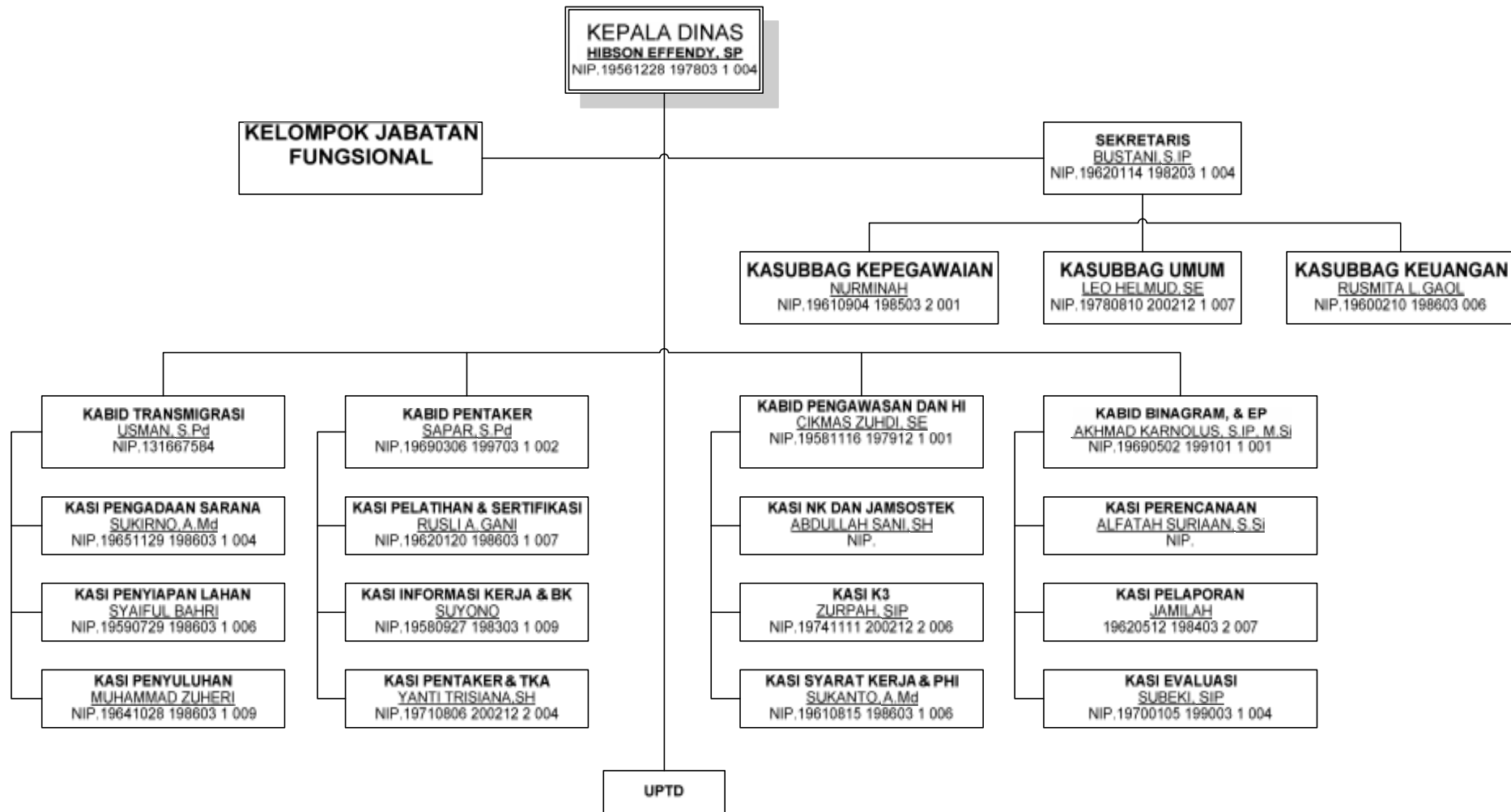
Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jabatan fungsional ini sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 telah diusulkan dan sedang dikonsultasikan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keterampilan, keahlian tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing. Jumlah jabatan fungsional tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



V. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan mencakup :

1. Kebijakan

- a. **Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran;**
- b. **Pemerataan penduduk di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;**
- c. **Peningkatan layanan publik yang berbasis *good governance* dan *clean goverment*.**

2. Program

- a. **Pengurangan pengangguran;**
- b. **Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;**
- c. **Revitalisasi BLKI;**
- d. **Peningkatan lapangan kerja;**
- e. **Perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan;**
- f. **Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;**
- g. **Transmigrasi regional;**
- h. **Pelayanan administrasi perkantoran;**
- i. **Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;**
- j. **Peningkatan disiplin aparatur;**
- k. **Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan kemampuan.**

VI. PERENCANAAN KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis 2012-2017, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran target yang harus dicapai dalam satu tahun

pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkatan kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan suatu organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksana.

Rencana kerja SKPD tahun 2014 ini merupakan komitmen seluruh stakeholder di jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

VII. TARGET KINERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 direncanakan melaksanakan program kegiatan dan anggaran melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) sebesar Rp.8.046.195.000 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU DANA (dalam ribuan rupiah)
1.	KETENAGAKERJAAN	
	• Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Rp. 655.998.000
	• Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp.1.395.718.000
	• Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Rp.2.191.907.000
	• Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 970.000.000
2.	KETRANSMIGRASIAN	
	• Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp.1.868.580.000
	• Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigarsi	Rp. 963.992.000
	JUMLAH	Rp.8.046.195.000

**USULAN PROGRAM/RENCANA KERJA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2014
BERDASARKAN INDIKATOR KERJA**

NAMA SATKER : DISNAKERTRANS PROV.KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PROGRAM (BERDASARKAN UNIT ESELON I)	KEGIATAN SUB KEGIATAN	VOLUME	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS						Rp 655.998.000
		1 Pelaksanaan dan Peningkatan Produktivitas	60,00 Orang	1 Jumlah pelayanan pelatihan bidang produktivitas	Tenaga kerja yang dilatih bidang produktivitas	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rp 110.000.000
		2 Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Binalattas	30,00 Orang/ Angk	2 Jumlah konsultasi bidang produktivitas 3 Jumlah kerjasama dan pemberdayaan lembaga peningkatan produktivitas 4 Jumlah pengembangan desa produktif 5 Jumlah pengembangan peningkatan produktivitas terpadu di perusahaan 1 Jumlah instruktur pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikasi 2 Jumlah manger BLK berbasis kompetensi yang dilatih	Upgrading/Pelatihan instruktur dan tenaga kepelatihan pemerintah dan swasta	-	Rp 141.020.000
		3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas	10,00 Dokumen	-	Peningkatan kelembagaan	-	Rp 57.258.000

		4 Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas	120,00 Orang	1 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan	Peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi	-	Rp 214.730.000
		5 Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Binalattas	48,00 Orang	2 Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi 1 Jumlah SKKNI yang ditetapkan	Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	-	Rp 132.990.000
				2 Program pelatihan berbasis kompetensi yang disusun 3 Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 4 Peningkatan kualitas dan penyelenggaraan kompetisi keterampilan dalam rangka ASC			
2	PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA						Rp 1.395.718.000
		1 Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	1,00 Lokasi	1 Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan pekerja migran 2 Amandemen UU 39/2004 3 Peraturan turunan Amandemen UU 4 Persentase calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan kab/kota 5 Perizinan kelembagaan dan evaluasi kinerja kelembagaan	Evaluasi kinerja kelembagaan	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja	Rp 202.238.000

			6	Kerjasama bilateral serta regional dan multilateral meliputi inisiasi, negosiasi dan perjanjian kerjasama			
	2	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	20,00 Orang	1	(a) Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara; (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara	Tenaga kerja sukarela yang melakukan pendampingan dalam program perluasan kesempatan kerja	Rp 863.480.000
			40,00 Orang	2	Jumlah wirausaha baru yang tercipta	Petugas pendamping lapangan yang mengikuti bimbingan teknis	
			1,00 Laporan	3	Jumlah kab/kota yang melaksanakan sinergi program APBN untuk perluasan kesempatan kerja melalui terapan teknologi tepat guna	Laporan kegiatan dan pembinaan	
	3	Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	8,00 laporan	4	Pemberdayaan pendampingan dan kerjasama antar lembaga		
				1	Adanya sistem informasi pasar kerja online	Pusat layanan informasi pasar kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp 330.000.000
				2	Tersedianya infrastruktur SIM pasar kerja (33 provinsi, 200 kab/kota)		
				3	Analisis pasar kerja		
				4	Analisis jabatan		
				5	Jumlah pusat layanan informasi pasar kerja tingkat provinsi dan kab/kota yang terhubung dengan sistem bursa kerja online dan menerapkan standar layanan sesuai model bisnis layanan yang baik		
				6	Pembangunan sistem informasi pasar kerja di kawasan ekonomi khusus		

				7 Jumlah pencari kerja yang memanfaatkan jasa pusat layanan informasi pasar kerja			
				8 Jumlah bursa kerja yang memenuhi standar pelayanan umum			
3	PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						Rp 970.000.000
		1 Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	140,00 Perusahaan	1 Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3	Penerapan SMK3	Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja	Rp 970.000.000
				2 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap dan bejana tekan			
				3 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma listrik, konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran			
				4 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja			
				5 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya			
				6 Sistem Pelaporan Monitoring dan Detekdi dini Kepatuhan Perusahaan			
				7 Peningkatan Tenaga Pengawas yang Sesuai Standar Kompetensi			
4	PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA						Rp 2.191.907.000

			1	Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	90,00 Orang	1	Jumlah lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan	Pemasyarakatan,TOT, Konsolidasi, Sosialisasi, Bimtek	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja melalui persyarakatan kerja,kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Rp 788.881.000
					120,00 Orang	2	Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB dan pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegoisasi	Verifikasi Keanggotan SP/SB		
						3	Jumlah pembentukan LKS Tripartit Kab/Kota			
						4	Jumlah lembaga Tripartit yang menerima sosialisasi IJP			
						5	Jumlah SDM yang memahami HI			
						6	Jumlah provinsi dan kab/kota yang menerima sosialisasi			
						7	Tersusunnya SKKNI ahli hubungan Industrial			
			2	Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100,00 Orang	1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) yang menjadi peserta Jamsostek	Sosialisasi,Konsolidasi dan Bimtek		Rp 139.818.000
						2	Jumlah tenaga kerja Luar Hubungan Kerja (LHK) yang menjadi peserta Jamsostek			
						3	Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan atau penerapan			
						4	Tersedianya roadmap BPJS (ketenagakerjaan)			

			5	Provinsi yang menerapkan upah minimum sama dengan KHL		
			6	Jumlah provinsi yang mendapat diseminasi		
3	Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial	10,00 Kasus	1	Rasio penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama	Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan HI	Rp 104.080.000
		30,00 Orang	2	Jumlah kasus yang diselesaikan konsiliator	Sosialisasi, konsolidasi, bimtek, forum	
			3	Jumlah pekerja yang melakukan mogok kerja		
			4	Jumlah hakim HI yang meningkat profesionalismenya		
			5	Kualitas pengadilan HI yang kredibel		
			6	Pilot project sistem pencegahan perselisihan HI melalui deteksi dini		
4	Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	30,00 Orang	1	Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan	Sosialisasi, konsolidasi, bimtek, forum	Rp 281.920.000
			2	Jumlah perjanjian kerja bersama (PKB) yang didaftarkan		
			3	Jumlah perjanjian kerja bersama (PKB)		
			4	Pekerja yang mendapatkan subsidi uang muka perumahan pekerja		
			5	Koperasi pekerja yang mendapatkan modal usaha		
			6	Optimalisasi pemahaman UU Ketenagakerjaan di BUMN		
			7	Penyusunan bahan kebijakan ketenagakerjaan pekerja		
			8	Penyusunan bahan kebijakan pengaturan hubungan kerja		

		5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	20,00 Paket	9 Sosialisasi, konsolidasi dan bimtek 1 Tata kelola personil, sarana dan prasarana dan aset (SABMN)	Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran		Rp 877.208.000
			1,00 Laporan 12,00 Bulan layanan	2 Tata kelola perencanaan program, data, informasi, pelaporan dan publikasi 3 Tata kelola keuangan (SAI, SAK) 4 Networking dalam dan luar negeri 5 Penerapan SKKNI Ahli Hubungan Industrial	Laporan monitoring dan evaluasi Layanan perkantoran		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI						Rp 963.992.000
		1 Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi	25,00 Hektar 100,00 Keluarga	1 Jumlah luasan lahan produktif dan produktivitas di kimtrans/kawasan 2 Jumlah kelompok masyarakat transmigrasi yang menerapkan teknologi pengolahan hasil pertanian 3 Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di kawasan transmigrasi 4 Jumlah kewirausahaan yang berkembang di kawasan transmigrasi	Luasan lahan usaha produktif di permukiman /kawasan transmigrasi Bantuan pengembangan usaha ekonomi di Kimtrans /KTM	Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing	Rp 27.250.000

			5	Jumlah kawasan yang dipersiapkan/dikembangkan /terwujud sebagai Argo Industri		
			6	Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di permukiman transmigrasi		
			7	Jumlah kewirausahaan yang berkembang di permukiman transmigrasi		
			8	Jumlah kawasan yang difasilitasi pengembangan usaha ekonominya di daerah tertinggal/perbatasan		
			9	Jumlah kawasan yang difasilitasi pengembangan usaha ekonominya di daerah strategis		
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	100,00 Orang	1	Jumlah transmigran yang mendapat bantuan pangan dan kesehatan di kimtrans	Bantuan pendidikan, pelayanan sosial budaya dan mental spiritual	Rp 176.049.000
		1,00 Lembaga	2	Jumlah kimtrans/kawasan yang mendapat layanan sosial budaya/pendidikan, mental spiritual	Kelembagaan kimtrans/KTM dan masyarakat yang mandiri	
		100,00 Keluarga	3	Jumlah kelembagaan /pengelola yang terbentuk dan berfungsi di kimtrans/kawasan	Bantuan pangan	
		400,00 Org/Kimtrans	4	Jumlah KK yang mendapat bantuan pendampingan/pemberdayaan di kimtrans	Bantuan kesehatan	
			5	Jumlah kelembagaan /pengelola yang terbentuk dan berfungsi di kimtrans/kawasan di daerah tertinggal/perbatasan		
			6	Jumlah kepala keluarga yang mendapat bantuan pendampingan/pemberdayaan di permukiman transmigrasi		

			7	Jumlah kawasan yang mendapat pendampingan /pemberdayaan di daerah tertinggal/perbatasan		
			8	Jumlah kawasan yang mendapat layanan sosial budaya/ pendidikan, mental spiritual		
			9	Jumlah kawasan yang mendapat bantuan pangan dan kesehatan di daerah strategis		
			10	Jumlah kawasan yang mendapat layanan sosial budaya/ pendidikan, mental spiritual di daerah strategis		
			11	Jumlah kelembagaan/pengelola yang terbentuk dan berfungsi di kawasan transmigrasi		
			12	Jumlah kelembagaan/pengelola yang terbentuk dan berfungsi di permukiman transmigrasi		
			13	Jumlah kawasan yang mendapat pendampingan/pemberdayaan di daerah strategis		
			14	Jumlah kawasan yang mendapat bantuan pangan dan kesehatan di daerah tertinggal/perbatasan		
			15	Jumlah kawasan yang mendapat pendampingan/pemberdayaan di daerah strategis		
3	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1,00 Bulan Layanan	1	Jumlah dokumen rencana masyarakat di kimtrans yang dapat diaplikasikan	Dukungan teknis lainnya PTPMK	Rp 111.031.000
			2	Jumlah dokumen rencana kawasan transmigrasi yang dapat diaplikasikan		
			3	Jumlah dokumen rencana pusat pertumbuhan yang dapat diaplikasikan		

				<p>4 Data dan informasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi akurat dan valid</p> <p>5 Jumlah master plan di WPT yang diperdakan</p> <p>6 Jumlah dokumen rencana pengembangan kawasan</p> <p>7 Jumlah dokumen rencana pengembangan kawasan di daerah strategis</p> <p>8 Jumlah dokumen rencana pengembangan pusat pertumbuhan baru</p> <p>9 data dan informasi permukiman transmigrasi</p> <p>10 Jumlah master plan, action plan di WPT yang diperdakan</p> <p>11 Data dan informasi kawasan transmigrasi</p> <p>12 Data dan informasi di kimtrans/ kawasan di daerah strategis</p> <p>13 Data potensi perkembangan kimtrans/kawasan di daerah tertinggal/perbatasan</p>				
		4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2MKT	12,00 Bulan layanan 20,00 Dokumen	1 Pelayanan Teknis dan Administrasi	Layanan perkantoran Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran Laporan Kegiatan		Rp 649.662.000	
6	PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						Rp 1.868.580.000	
		1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	50,00 KK	1 Jumlah kawasan yang difasilitasi penempatan transmigrasinya di daerah tertinggal / perbatasan	Keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi di wilayah strategis	Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan	Rp 346.610.000	

		2 Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	1,00 Unit	2 Jumlah kawasan yang difasilitasi penempatan transmigrasinya di daerah strategis 1 Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarannya di daerah tertinggal/perbatasan	Sarana yang dibangun	Rp	173.000.000
		3 Penyediaan Tanah Transmigrasi	7000 Hektar	2 Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarannya di daerah strategis 1 Jumlah kawasan yang disediakan lahannya di daerah tertinggal/perbatasan	Lahan yang tersedia di wilayah strategis	Rp	130.000.000
		4 Partisipasi Masyarakat	3,00 Lembaga	2 Jumlah kawasan yang disediakan lahannya di daerah strategis 1 Jumlah kawasan yang terdapat partisipasi dari lembaga pemerintah di daerah tertinggal/perbatasan	Lembaga pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal/perbatasan	Rp	64.950.000
		5 Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P2KTrans	1,00 Satker	2 Jumlah kawasan yang terdapat partisipasi dari lembaga pemerintah di daerah strategis 3 Jumlah kawasan yang terdapat partisipasi dari lembaga non pemerintah di daerah tertinggal/perbatasan 4 Jumlah kawasan yang terdapat partisipasi dari lembaga non pemerintah di daerah strategis 1 Pelayanan teknis dan administratif	Pelayanan teknis dan administratif	Rp	1.154.020.000
TOTAL							

Sementara untuk Program kegiatan dan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diusulkan sebesar Rp.20.696.707.250,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA (dalam ribuan rupiah)
	BELANJA LANGSUNG	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.830.314.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.197.840.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 150.000.000
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 636.053.000
5.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 817.869.000
6.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 147.946.250
7.	Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 4.154.331.200
8.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp. 1.032.343.300
9.	Program Pengembangan HI dan Jamsostek	Rp. 1.989.810.000
10.	Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	Rp. 1.150.000.000
11.	Program Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 2.863.103.000
12.	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.001.245.500
13.	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 725.852.000
	JUMLAH	Rp.20.696.707.250

**RENCANA KERJA SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

URUSAN WAJIB

NAMA SKPD	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA	TUJUAN	SASARAN
	DISNAKERTRANS PROV BABEL	Rp 20.696.707.250		
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 4.830.314.000		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 20.000.000	Pelaksanaan surat menyurat kedinasan	Penunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Rp 249.996.000	Ketersediaan sumber daya komunikasi, informasi, air dan listrik	Penunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 94.560.000	Pelaksanaan jasa administrasi keuangan dilakukan dengan tertib, lancar dan terkendali kepada pengelola keuangan dibayarkan honor dan uang lembur sesuai kebutuhan	Jasa administrasi keuangan dapat dilaksanakan serta honor/uang lembur bagi pengelola
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 545.491.000	Kebersihan dan keamanan lingkungan kantor dapat terjaga sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman serta gedung/halaman dapat terpelihara dengan baik	Tempat kerja dan lingkungannya agar tetap bersih dan indah
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 128.159.000	Fungsi alat-alat kantor bisa tetap maksimal untuk menunjang pencapaian kinerja dinas	Tempat kerja dan lingkungannya agar tetap bersih dan indah
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 312.850.000	Ketersediaan alat tulis kantor	Alat-alat tulis kantor tersedia cukup
	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 26.000.000	Barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan aktivitas administrasi kantor	Penunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp 30.000.000	Ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor	Penunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran
	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 30.000.000	Tersedianya bahan-bahan	Pembinaan dan pemberdayaan pegawai
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 50.000.000	Konsumsi untuk keperluan harian dan rapat	Meningkatkan semangat/kinerja pegawai berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan pegawai
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 1.818.619.000	Dana belanja perjalanan dinas untuk keperluan rapat dan konsultasi	

	12	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	21.450.000	Jasa tenaga kerja pelayanan administrasi perkantoran non PNS	Penunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran
	13	Operasional Perkantoran (UPTD BLKI)	Rp	768.364.500	Penyediaan Belanja Administrasi Perkantoran UPTD BLKI	Optimal pelayanan tugas sehari-hari
	14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD BLKI	Rp	200.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD BLKI	Optimal pelayanan tugas sehari-hari
	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLKI	Rp	145.500.000	Penyediaan Belanja Administrasi Perkantoran UPTD BLKI	Optimalisasi pelayanan tugas sehari-hari
	16	Operasional Perkantoran (UPTD Balai Hyperkes)	Rp	130.218.000	Penyediaan belanja administrasi perkantoran UPTD Balai Hyperkes	Pemenuhan kebutuhan operasional UPTD Balai Hyperkes
	17	Operasional Perkantoran (UPTD BPPD)	Rp	91.470.000	Penyediaan belanja administrasi perkantoran UPTD BPPD	Operasional pelayanan administrasi di UPTD BPPD berjalan sesuai tupoksi dan kinerja
	18	Operasional Kios 3 in 1	Rp	46.784.500	Terlaksana kegiatan operasional kios 3 in 1	Peningkatan jejaring networking BLKI dengan pencari kerja dan dunia usaha
	19	Fasilitasi Tim Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Provinsi	Rp	102.630.000	Terwujudnya konsisten program/kegiatan sesuai perencanaan tenaga kerja	Aparatur
	20	Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi	Rp	18.222.000	Berjalannya pelayanan teknis dan administrasi TPAK Fungsional para instruktur BLKI	Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas
B		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp	1.197.840.000		
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	185.930.000	Tersedianya sarana dan prasarana kantor terutama UPTD Hyperkes dan UPTD BPPD	Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BLKI	Rp	200.000.000	Meningkatnya peralatan gedung kantor	Pencari kerja dan masyarakat
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	300.000.000	Sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dengan baik perlu dilakukan perawatan/pemeliharaan secara rutin	Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	511.910.000	Agar mobil/kendaraan operasional kondisinya selalu dalam keadaan baik perlu diadakan pemeliharaan	Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas
C		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp	150.000.000		
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp	150.000.000	Peningkatan kapasitas pelayanan administrasi perkantoran	Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas
D		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp	636.053.000		
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp	540.370.000	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur
	2	Workshop PTK	Rp	95.683.000	Memberikan pemahaman pendalaman materi PTK	Dinas Kabupaten/Kota
E		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	Rp	817.869.000		
	1	Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan	Rp	42.658.000	Tersedianya pengembangan data dan informasi	

	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi	Rp	91.344.000	Tersusunnya rencana tenaga kerja provinsi tahun 2014 s.d 2015	Aparatur
	3	Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Rp	45.179.000	Terwujudnya tata kelola sistem pelaporan bidang Nakertrans	Aparatur
	4	Penyusunan LAKIP	Rp	21.080.000	Penyusunan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tepat sasaran	Dinas Kabupaten/Kota
	5	Rapat Koordinasi Teknis Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Rp	92.730.000	Penyusunan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tepat sasaran	Dinas Kabupaten/Kota
	6	Pameran Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Rp	76.730.000	Terprogramnya pelaksanaan program sesuai peraturan yang berlaku	Dinas Kabupaten/Kota
	7	Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Rp	25.733.000	Lancarnya koordinasi dalam daerah	Aparatur
	8	Study Kelayakan Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal	Rp	184.225.000	Terwujudnya perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal	-
	9	Sosialisasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	Rp	238.190.000	60 orang mendapat sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi perpanjangan IMTA	-
F		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp	147.946.250		
	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp	15.406.250	Lancarnya koordinasi dalam daerah	Laporan kegiatan
	2	Monev Tenaga Kerja Asing (TKA)	Rp	132.540.000	Terdatanya jumlah TKA Kab/Kota Prov.Kep.Babel	-
G		PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Rp	4.154.331.200		
	1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/Kota	Rp	2.033.800.000	Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pencari kerja dan masyarakat
	2	Sosialisasi BLKI TUK Kios 3 in 1	Rp	86.233.000	Terlaksana kegiatan operasional kios 3 in 1	Peningkatan jejaring networking BLKI dengan pencari kerja dan dunia usaha
	3	Teknologi Tepat Guna	Rp	414.238.000	200 orang yang mendapat pelatihan terapan teknologi tepat guna	-
	4	Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri	Rp	17.080.000	Terlaksananya kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelayanan penempatan tenaga kerja	-
	5	Pelatihan Kewirausahaan untuk Pemula	Rp	513.457.000	Tersedianya anggaran pelatih kewirausahaan bagi pemula	-
	6	Pelatihan Kewirausahaan Produktif	Rp	572.458.000	Tersedianya anggaran pelatihan kewirausahaan produktif	-
	7	Pelatihan Peningkatan Desa Produktif	Rp	217.500.000	Tersedianya anggaran pelatihan peningkatan desa produktif	-
	8	Fasilitasi Penyusunan PTK Kab/Kota	Rp	299.565.200	Tersusunnya perencanaan tenaga kerja di Kab/Kota	Dinas Kabupaten/Kota
H		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	Rp	1.032.343.300		

	1	Fasilitasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk.Provinsi	Rp 120.400.000	Tercipta kawasan transmigrasi yang baru	Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas
	2	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi	Rp 330.087.800	Tercipta transmigrasi yang berteknologi tepat guna	Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas
	3	Gema Bulan Bhakti Transmigrasi Nasional	Rp 222.500.000	Pembinaan kawasan masyarakat transmigrasi	Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas
	4	Kerjasama Antar daerah	Rp 19.141.500	Tercipta kawasan transmigrasi yang baru	-
	5	Fasilitasi Penempatan Transmigran	Rp 197.650.000	Tercipta transmigrasi yang berteknologi tepat guna	-
	6	Study Identifikasi Calon Areal (SICA)	Rp 142.564.000	Tercipta kawasan transmigrasi yang baru	Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas
I		PROGRAM PENGEMBANGAN HI dan JAMSOSTEK	Rp 1.989.810.000		
	1	Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan	Rp 500.000.000	Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Lembaga tenaga kerja
	2	Survey KHL	Rp 88.350.000	Terpenuhi dan tersedianya data KHL Kab/Kota sebagai salah satu unsur pertimbangan dalam penetapan UMP, UMK/UMSK 2014	Lembaga Tenaga Kerja
	3	Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK	Rp 411.550.000	Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Lembaga tenaga kerja
	4	Bimtek Kesetaraan Gender di Tempat Kerja	Rp 106.410.000	Pemahaman dan penerapan kesetaraan gender di tempat kerja	Lembaga Tenaga Kerja
	5	Bimtek Tatacara Pembentukan LKS Bipartit	Rp 118.050.000	Pemahaman tentang tata cara pembentukan LKS Tripartit	Lembaga Tenaga Kerja
	6	Bimtek Tatacara Pembuatan Pendaftaran dan Pengesahan PP	Rp 105.600.000	Pemahaman mengenai tata cara pembuatan, pendaftaran dan pengesahan PP	Lembaga Tenaga Kerja
	7	Bimtek Tatacara Pembuatan Pendaftaran dan Pengesahan PKB	Rp 106.650.000	Pemahaman mengenai tata cara pembuatan, pendaftaran dan pengesahan PKB	Lembaga Tenaga Kerja
	8	Bimtek Struktur dan Skala Upah	Rp 61.550.000	Pemahaman mengenai struktur dan skala upah	Lembaga Tenaga Kerja
	9	Penyuluhan dan Pembinaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota	Rp 29.500.000	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Lembaga Tenaga Kerja
	10	Penyelesaian Perselisihan HI	Rp 45.750.000	Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan	Lembaga Tenaga Kerja
	11	Sosialisasi Pemasarakatan HI dan K3 di Lingkungan Dunia Pendidikan	Rp 416.400.000	Tersebar nya informasi tentang pemasarakatan HI dan K3 di Lingkungan Dunia Pendidikan	-
J		PROGRAM REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (BLKI)	Rp 1.150.000.000		
	1	Pemasangan Kawat Berduri dan Partisi Kaca BLKI	Rp 550.000.000	Terlaksananya pembangunan fasilitas gedung BLKI	Kegiatan sarana dan prasarana penunjang
	2	Pengadaan DED Landscape BLKI	Rp 200.000.000	Terlaksananya pembangunan fasilitas gedung BLI	

	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Asrama UPTD BLKI	Rp	300.000.000	Meningkatnya sarana dan prasarana BLKI	-
	4	Pengadaan Plang Reklame UPTD BLKI	Rp	100.000.000	Terlaksananya pengadaan plang reklame BLKI	Sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas
K		PROGRAM PERLINDUNGAN TK DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Rp	2.863.103.000		
	1	Peningkatan Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Rp	53.358.000	Terlaksananya kegiatan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja	Perusahaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	2	Pengujian Lingkungan Kerja	Rp	130.212.000	Terlaksananya kegiatan pengujian lingkungan kerja	21 perusahaan di 7 Kab/Kota
	3	Pemeriksaan Tenaga Kerja	Rp	144.208.000	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	Perusahaan di 7 Kab/Kota
	4	Pemeriksaan Norma Kerja Perempuan dan Anak	Rp	81.000.000	Terlaksananya pemeriksaan dan pembinaan NKPA di perusahaan	-
	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Tenaga Kerja	Rp	142.670.000	Terlaksananya sosialisasi norma kerja perempuan dan anak	-
	6	Sosialisasi Pengawasan Permenaker No.Per.02 /MEN/XIII/2008 Tentang Tatacara Penggunaan TKA	Rp	44.320.000	Terlaksananya perlindungan tenaga kerja asing	-
	7	Sosialisasi Norma SMK3	Rp	128.640.000	Terlaksananya sosialisasi SMK3	-
	8	Sosialisasi Norma K3 (Pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja)	Rp	134.540.000	Terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS di tempat kerja	-
	9	Pemeriksaan Pelaksanaan Kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	Rp	104.500.000	Terlaksananya pemeriksaan kepesertaan jamsostek di perusahaan	-
	10	Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	Rp	140.000.000	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan di perusahaan	-
	11	Pelatihan Bahasa Asing Dalam Rangka Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri	Rp	627.954.000	40 orang yang mendapat pelatihan bahasa asing (Jepang)	-
	12	Sosialisasi Penggunaan Alat Uji K3 Bagi Pegawai Pengawas	Rp	125.000.000	Terlaksananya sosialisasi peralatan K3 bagi pegawai pengawas	-
	13	Gema Bulan Bhakti Transmigrasi K3 Nasional di Prov. Kep.Babel	Rp	345.000.000	Terwujudnya Budaya K3 di setiap kegiatan usaha	SDM perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	14	Sosialisasi Penerapan K3	Rp	102.515.000	Terpenuhinya kebutuhan alat uji K3 sebagai penunjang dalam kegiatan pengujian K3 di Hyperkes	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Balai Hyperkes
	15	Penyuluhan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas K3	Rp	102.468.000	Terlaksananya penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik bagi perusahaan	-
	16	Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan	Rp	40.650.000	Terpenuhinya alat uji yang baik sebagai penunjang kegiatan pemeriksaan dan pengujian lingkungan perusahaan (UPTD Hyperkes)	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Balai Hyperkes
	17	Rapat Koordinasi Dengan Pengawas Ketenagakerjaan	Rp	102.468.000	Terkoordinasinya program Hyperkes dengan peng dan bidang pengawasan	

	18	Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan bagi Camat, Kades dan Lurah	Rp	313.600.000	Terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	SDM perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
L		PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp	1.001.245.500		
	1	Promosi Produktivitas Daerah	Rp	73.800.000	Agar masyarakat mengenai BPPD sebagai lembaga produktivitas daerah	Pelaku usaha, pekerja dan perusahaan memahami pentingnya produktivitas
	2	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Bagi Pencari Kerja Usia Produktif	Rp	233.200.000	60 % wirausaha baru laki-laki/perempuan yang menerapkan materi produktivitas tenaga kerja bagi tenaga kerja	300 orang wirausaha mendapatkan pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja
	3	Pelatihan Motivasi Prestasi	Rp	133.290.000	60 % wirausaha dan pekerja dapat mengembangkan pola pikir sikap mental perilaku dalam melaksanakan tugasnya	40 orang wirausaha / pekerja mendapatkan pelatihan motivasi berprestasi
	4	Bimtek 5 S	Rp	122.010.000	Melaksanakan penerapan 5 S	40 pekerja diperusahaan mendapatkan bimtek 5S
	5	Analisis Produktivitas dan Standar Dasar Penetapan Pengupahan Minimum	Rp	198.820.000	Perusahaan mampu mengukur dan menganalisa tingkat produktivitas yang dicapai sebagai bahan perencanaan peningkatan produktivitas yang diinginkan dan standar pengupahan berdasarkan produktivitas	100 orang perwakilan perusahaan melaksanakan standar pengupahan berdasarkan produktivitas tenaga kerja
	6	Bimtek Manajemen Lembaga Pelatihan Kerja	Rp	124.775.000	Terlaksananya sertifikasi tenaga kerja	Pencari kerja
	7	Sertifikasi Tenaga Kerja	Rp	115.350.500	Terlaksananya sertifikasi tenaga kerja	Pencari kerja
M		PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Rp	725.852.000		
	1	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Rp	85.187.000	Sosialisasi peraturan penempatan tenaga kerja dalam negeri	Sekolah-sekolah kejuruan
	2	Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Rp	437.310.000	60 orang yang mengikuti pelatihan tenaga kerja mandiri	Pencari kerja
	3	Monitoring Penggunaan TKA	Rp	43.400.000	Terdatanya jumlah TKA di kab/Kota Prov Babel	Perusahaan pengguna tenaga kerja asing
	4	Bimtek analisis Pasar Kerja	Rp	102.755.000	Data pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans Prov.Kep.Babel	Pencari kerja
	5	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Online	Rp	57.200.000	Data pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans Prov.Kep.Babel	Pencari kerja

VIII. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibuat yang merupakan gambaran program kegiatan dan anggaran bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan di tahun 2014, baik kegiatan yang dibiayai dari dana APBN maupun dana APBD.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan target kinerja tahun 2014 terealisasi secara efektif dan efisien dalam rangka terwujudnya *good governance and cleans goverment* di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.